RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis atau biasa disebut Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai (outcome) dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Unit Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM untuk lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanana Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2015 – 2019. Selain itu, Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024 dan Rentra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, serta visi dan misi nasional maupun Kemenko Polhukam.

Perencanaan strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organiassi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan komunikasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)

Rencana strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2020-2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kinerja; penyusunan rencana kerja dan anggaran; penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan, dan pengendalian kegiatan; penyusunan Laporan Kinerja; serta peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian sasaran Renstra 2020 – 2024 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM periode 2020 – 2024.

Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Dr. Fadil Zumhana

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I 4

1.1 Kondisi Umum 4

1.2 Potensi dan Permasalahan 16

BAB II 21

2.1 VISI 21

2.2 MISI 21

2.3 TUJUAN 22

2.4 Sararan Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 23

2.5 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 26

BAB III 30

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian 30

3.2 Kerangka Regulasi 38

3.3 Kerangka Kelembagaan 38

3.4 Struktur Organisasi 40

BAB IV 41

4.1 Target Kinerja 41

4.2 Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan 41

BAB V 43

Lampiran 1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 45

Lampiran 2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM 47

Lampiran 3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 49

Lampiran 4 INDIKATOR KELUARAN 54

Lampiran 5 MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 56

Lampiran 6 MATRIKS KERANGKA REGULASI 68

Lampiran 7 MATRIKS POHON KINERJA 69

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perkembangan Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta birokrasi professional, terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan Negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan "kondisi perlu" untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Dalam menghadirkan "kondisi perlu", pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Sistem Hukum Nasional yang Mantap, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya

peraturan perundang- undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpah tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan. Pembangunan bidang hukum memiliki peranan yang penting untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum, selalu menempatkan peran hukum sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hukum merupakan sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu pra-syarat yang sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan Indonesia sebagai negara hukum, guna memantapkan kepastian hukum yang lebih baik lagi, sehingga rasa aman, rasa keadilan dan pelaksanaan kehidupan bernegara yang kondusif akan mempercepat terwujudnya Negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Penegakan supremasi hukum (*rule of law*), dengan mengedepankan kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Dalam mendukung pencapaian penegakan supremasi hukum, Pemerintah telah melakukan upaya penataan produk hukum maupun penanganan permasalahan bidang hukum, seperti dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan yang diakomodasi melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Beberapa permasalahan penegakan hukum terkait penanganan kasus korupsi, penanggulangan pelanggaran Hak Kekayaan

Intelektual (HKI), serta pemajuan dan perlindungan HAM belum dapat diselesaikan secara tuntas karena adanya hambatan ego sektoral dari instansi terkait dan adanya aturan hukum yang ketinggalan seiring berkembangnya kasus kejahatan tersebut.

1.1.1 Capaian Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2019

Sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya periode 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pada periode ini, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diarahkan pada pengawalan isu-isu strategis dalam mengawal peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan dan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk mengawal isu tersebut arah dan fokus Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) yang dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diantaranya mengawal capaian Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

A. Indeks Pembangunan Hukum (IPH)

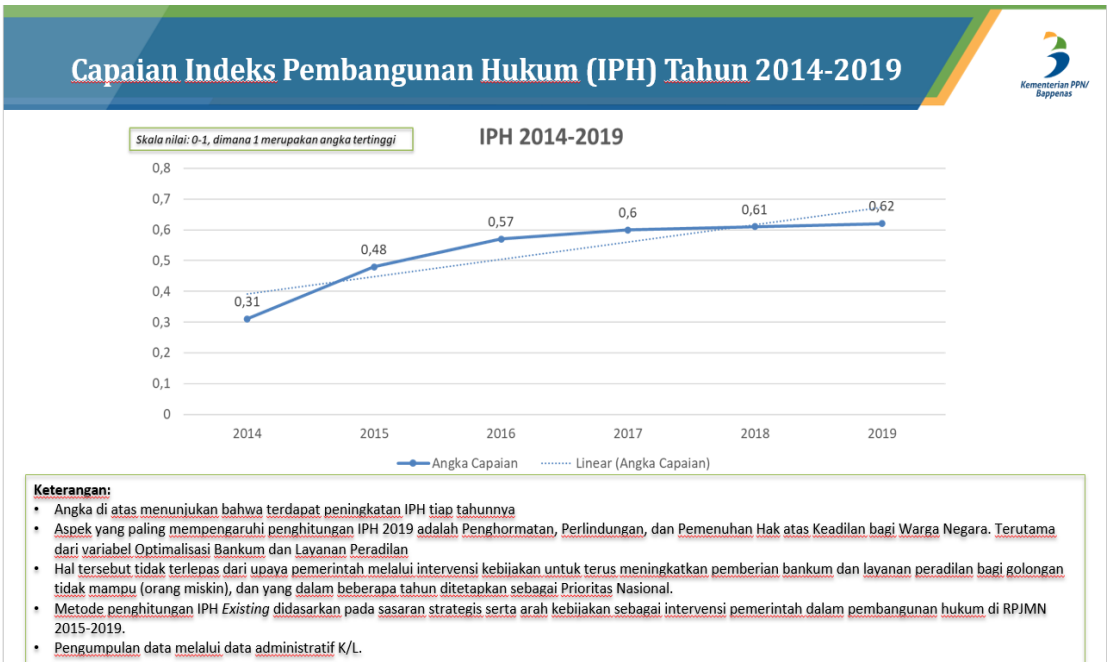

Gambar 1.1 Capaian IPH Tahun 2014-2019

IPH menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2014-2019, yaitu 0,48 (2015) menjadi 0,61 (2018). Capaian IPH tahun 2019 mencapai 0,62. Beberapa variabel berpengaruh terhadap peningkatan capaian tersebut, diantaranya adalah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat. Keberhasilan pelaksanaan SPPA terlihat dari penurunan jumlah Anak dengan Bantuan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dari 3.556 orang menjadi 1.591 orang pada Maret 2019. Penurunan tersebut menunjukkan keberhasilan diversi sebagai wujud dari keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi juga didukung dengan sarana prasarana seperti LPKA di 33 provinsi dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di 4 provinsi.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sistem peradilan yang cepat terlihat dari meningkatnya jumlah penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2018 sebanyak 6.469

dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.135 perkara. Penyelesaian perkara melalui jalur Mediasi juga mengalami peningkatan menjadi 5.306 di 2018 dibandingkan tahun 2017 sebanyak 2.646 perkara. Upaya lain yang dilakukan mencapai sasaran IPH di tahun 2019 telah ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) oleh 8 (delapan) Kementerian/Lembaga (K/L) antara lain: Mahkamah Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Lembaga Sandi Negara. Upaya yang perlu terus dilakukan dalam mendorong pembangunan hukum diantaranya berupa penataan regulasi, perbaikan sistem peradilan, optimalisasi upaya anti korupsi, serta peningkatan akses terhadap keadilan.

B. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

IPAK Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 3,66. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. SPAK mengukur Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi yang sudah lazim terjadi dan dianggap sebagian masyarakat sebagai hal yang lumrah. Sedangkan pengalaman mengakses di 10 jenis layanan publik dan pengalaman lainnya. Adapun

indikator dari dimensi persepsi yaitu keluarga, komunitas, dan publik. Sedangkan indikator dari pengalaman antara lain pengalaman publik (pengurus RT/RW, Kelurahan/Kecamatan, Dukcapil, Layanan Kesehatan, Sekolah negeri, KUA, Kepolisian, PLN, Pengadilan, BPN) dan pengalaman lainnya (kampanye pemilu, penerimaan Pegawai Negeri/Swasta, penerimaan Masuk Sekolah dan uang damai saat ditilang).

Gambar 1.2. Capaian IPAK Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (StranasPPK) menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) dan pada tahun 2018 Perpres tersebut telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Survei Indeks Perilaku Anti Korupsi telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, kecuali tahun 2016. Untuk tahun 2018, SPAK dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sampel sebesar 9.952 rumah tangga. Indeks Perilaku Anti Korupsi disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu persepsi dan pengalaman. Oleh karena itu, analisis mengenai perilaku anti korupsi hanya dapat dilakukan sampai

level nasional.

Berdasarkan hasil survey dari Badan Pusat Statistik, Indeks perilaku anti-korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2019 sebesar 3,70 atau lebih tinggi 0,04 poin dibanding 2018 yang sebesar 3,66. Skala 5 menunjukkan sikap antikorupsi dan skala 0 tidak.

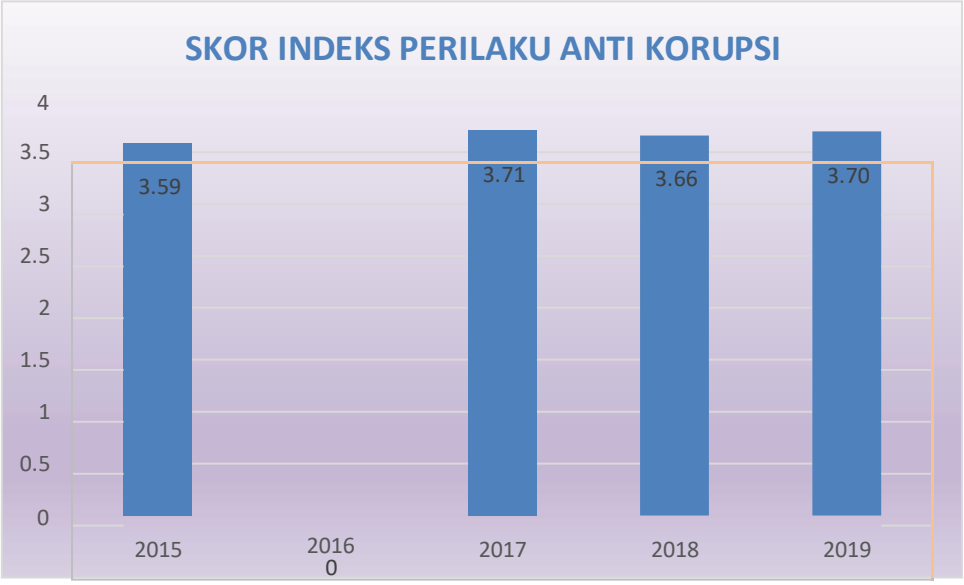

Gambar 1.3 capaian skor IPAK

IPAK disusun berdasarkan variabel indeks persepsi dan pengalaman. Pada tahun ini nilai indeks persepsi sebesar 3,80 atau turun 0,06 poin dibanding 2018 sebesar 3,86 persen. Namun, indeks pengalaman di 2019 sebesar 3,65 atau naik sebesar 0,08 poin dibanding di 2018 senilai 3,57.

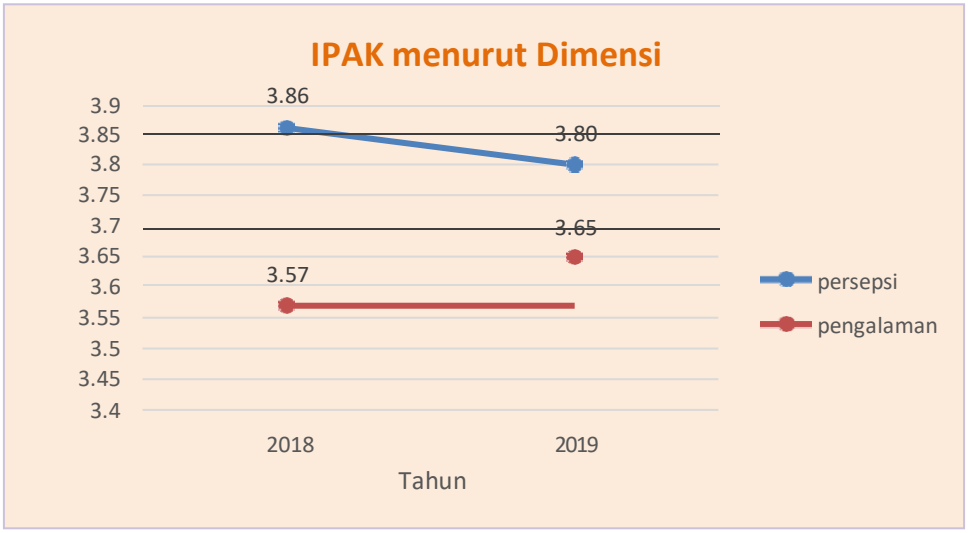

Gambar1.4. Perbandingan Variabel Persepsi dan Pengalaman tahun 2018 dan 2019

Berikut merupakan tabel indeks yang diukur melalui dimensi persepsi dan pengalaman masyarakat perkotaan dan pedesaan:

Keterangan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan dan Pedesaan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Indeks keluarga	4,24	4,19	4,04	4,01	4,15	4,11
Indeks komunitas	3,41	3,38	3,33	3,36	3,37	3,37
Indeks publik	4,17	4,10	3,85	3,70	4,02	3,92
Indeks Persepsi	3,97	3,91	3,74	3,66	3,86	3,80
Indeks pengalaman publik	3,91	4,03	3,40	3,47	3,68	3,78
Indeks pengalaman lainnya	3,24	3,24	3,26	3,26	3,25	3,25
Indeks pengalaman	3,74	3,84	3,36	3,42	3,57	3,65
IPAK	3,81	3,86	3,47	3,49	3,66	3,70

Pada tahun 2019, IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,86) dibanding masyarakat perdesaan (3,49). Hal tersebut dilihat dari dimensi persepsi, dimana indeks persepsi masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,91) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (3,66). Dan pada dimensi pengalaman, indeks pengalaman masyarakat perkotaan lebih tinggi (3,84) dibandingkan dengan masyarakat pedesaan (3,42). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi dan pengalaman masyarakat perkotaan lebih cenderung semakin anti korupsi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan.

Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin anti korupsi. Pada tahun 2019, IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,57; SLTA sebesar 3,94; dan di atas SLTA sebesar 4,05

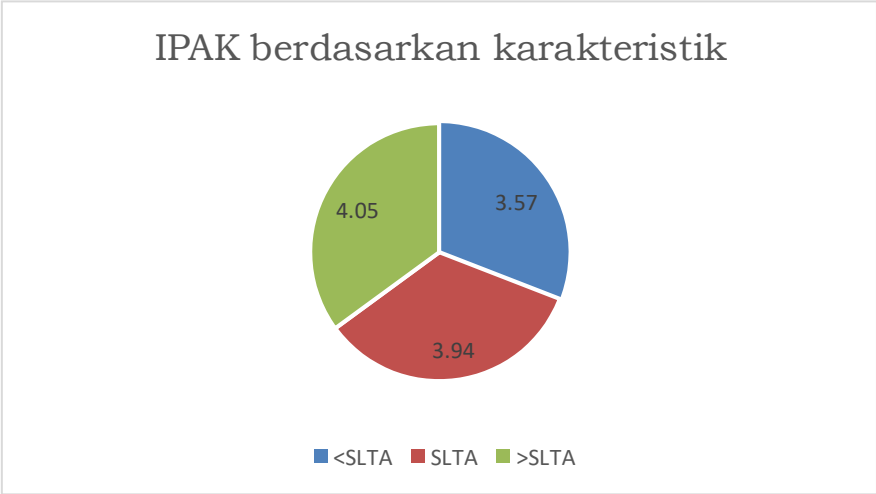

Gambar 1.5 Perbandingan IPAK menurut karakteristik pendidikan

Masyarakat pada usia 40–59 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok usia lain. Tahun 2019, IPAK masyarakat berusia 40 tahun ke bawah sebesar 3,66; usia 40–59 tahun sebesar 3,73; dan usia 60 tahun atau lebih sebesar 3,66

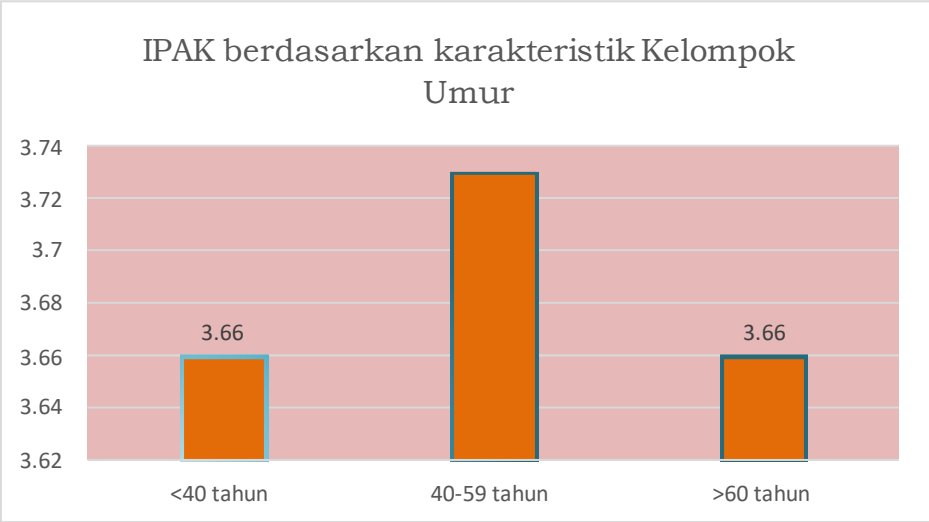

Gambar 1.6 Perbandingan IPAK menurut karakteristik kelompok umur

Penurunan nilai indeks persepsi ini terlihat dari meningkatnya persepsi masyarakat yang menganggap wajar korupsi di lingkungan keluarga.Dalam poin sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut mengalami peningkatan persentase dari 22,52 persen pada tahun lalu

menjadi 25,56 persen. Sementara pada poin seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga juga semakin dianggap wajar masyarakat dengan peningkatan dari 20,74 persen pada tahun lalu menjadi 22,52 persen pada tahun ini.

Selanjutnya pada poin orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/ PEMILU demi mendapatkan uang lebih banyak juga semakin dianggap wajar dengan persentase meningkat dari 12,61 persen menjadi 12,88 persen. Kemudian, masyarakat juga menganggap wajar seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya dengan peningkatan persentase dari 2,41 persen menjadi 2,76 persen. Pada poin seseorang menggunakan barang milik anggota rumah tangga lain tanpa izin juga dianggap wajar masyarakat dengan persentase meningkat dari 4,47 persen menjadi 5,15 persen.

Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin permisif masyarakat terhadap korupsi, Selanjutnya, IPAK 2019 berdasarkan dimensi pengalaman meningkat dari indeks 3,57 menjadi 3,65. Hal ini terlihat dari persentase masyarakat yang mengakses layanan publik sendiri pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari 80,14 persen menjadi 81,64 persen. Kemudian, persentase masyarakat yang memberikan uang atau barang melebihi ketentuan dan menganggap hal tersebut wajar mengalami penurunan dari 19,61 persen menjadi 15,84 persen.

1.1.2 Aspirasi Masyarakat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi strategis dalam mengoordinasikan Kementerian dan Lembaga dibawahnya. Hampir

seluruh aspek bidang politik, hukum, pertahanan serta keamanan negara berhubungan langsung dengan rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Rekomendasi Kebijakan dimaksud salah satunya meliputi bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Dalam lima tahun terakhir Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang telah diberikan, diantaranya terkait rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Penilaian tingkat kepuasan itu sendiri terdiri dari indikator *tangibles, realibility, responsiveness, assurance*, dan *emphaty*.

Survey dimaksud dilakukan selama periode tahun 2015-2019 pada Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Dengan dilaksanakannya survey tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi pelayanan saat ini yang tertuang dalam skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, serta harapan *stakeholders* sebagai dasar pengambilan kebijakan Peningkatan Kinerja Layanan.Hasil dari survei menunjukkan peningkatan *trend* skor Indeks Kepuasan *Stakeholder* dari tahun ke tahun. Indeks Kepuasan Stakeholder Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM (skala likert 1-5) dari tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagaimana dalam grafik berikut

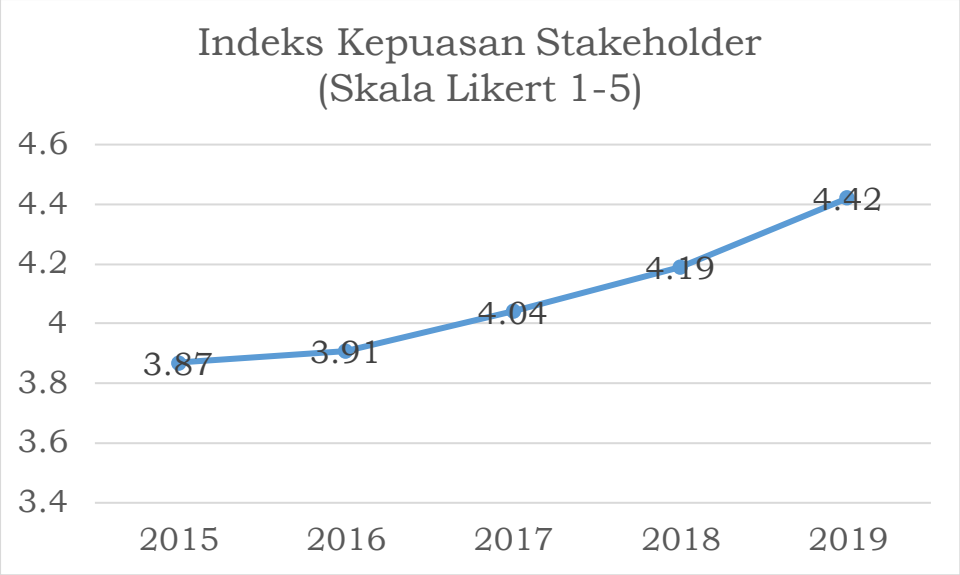

Grafik 1.1 Indeks Kepuasan Stakeholder
Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM

Peningkatan trend skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan bagian dari perbaikan pelayanan dari tahun ke tahun terhadap stakeholders dibawah koordinasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada responden di masing-masing Kementerian dan Lembaga dibawah koordinasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, didapatkan skor indeks pada tahun 2015 sebesar 3.87. Pada tahun 2016 dan 2017, terjadi kenaikan walaupun tidak secara signifikan 0.04 poin menjadi 3.91 serta kenaikan 0.13 poin menjadi 4.04. Kemudian pada tahun 2018, terjadi peningkatan kembali dari 4.04 menjadi 4.19, dimana kenaikan terjadi sebesar 0.15 poin dari skor indeks sebelumnya. Yang terakhir pada tahun 2019, kenaikan yang cukup signifikan, yaitu kenaikan 0.23 poin dimana skor indeks menjadi 4.42, hal ini dikarenakan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terus melakukan pembenahan atas pelayanan yang diberikan.

Walapun dari tahun ke tahun skor Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM terus

meningkat, namun tidak menyurutkan semangat perubahan dari masing masing individu di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM untuk terus melakukan perbaikan pelayanan kepada stakeholders dibawah Koordinasi Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pada Bagian ini akan dibahas analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threaths*), yaitu potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Deputi Bidang Koordiansi pada jangka menengah, baik secara makro dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

A. Potensi/Kekuatan

- Secara umum stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan semakin kondusif. Kehidupan politik yang sehat, kepastian hukum, dan stabilitas keamanan merupakan prasyarat dalam dalam Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi;
- Komitmen Pemerintah terhadap penegakan hukum semakin tinggi;
- Komitmen menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI ditunjukkan oleh seluruh elemen bangsa;
- Pimpinan yang berkomitmen dalam mencapai sasaran dan target kinerja;
- Pejabat dari Lintas Kementerian/Lembaga di Lingkungan Deputi III Bidkoor Kumham Kemenko Polhukam memudahkan koordinasi;
- Kewenangan penanganan masalah bidang hukum yang cukup luas

B. Permasalahan/Kelemahan

- Negara dianggap kurang memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, memberikan ruang terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial;
- Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik kesektarian dan berbagai bentuk intolerensi dan menjadi ancaman bagi pembangunan karakter;
- Kuatnya arogansi sektoral;
- Perlunya penguatan tata kerja koordinasi antara kementerian koordinator dengan kementerian teknis yang ada di bawah koordinasinya;
- Adanya fenomena *regulation trap* (tumpang tindih peraturan) dan *bottlenecking* dalam peraturan perundang-undangan;
- Masih adanya potensi separatisme dan terorisme yang menjadi faham sebagian kelompok tertentu (termasuk ASN/aparat keamanan) yang mengganggu kedaulatan bangsa dan Negara.

C. Peluang

- Secara geopolitik Indonesia sangat diuntungkan terutama dalam perwujudan keamanan kawasan.
- Bonus demografi merupakan peluang tersedianya SDM produktif dalam rangka pembangunan nasional.
- Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal,

pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan.

D. Tantangan

- Peningkatan stabilitas keamanan negara

  Target utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan memperkuat Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparatur penegak hukum khususnya Polri, dan meningkatkan kekuatan Alutsista pada seluruh Matra.

- Pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah masyarakat dan masyarakat.

- Pemberantasan Korupsi

  Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan

(*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum.

E. Lingkungan Strategis

- Lingkungan Geo-Politik Global

  Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Kontelasi politik global ditandai dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global dan indikasi perang teknologi informasi merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi.

- Lingkungan Geo-Poltik Regional

  Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang berkepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.

- Lingkungan Geo-Politik Nasional

  Pada lingkungan strategis nasional, Indonesia akan mengahadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat

menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM

2.1 VISI

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 adalah "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Sejalan dengan visi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Hukum dan HAM, maka visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah **"Terwujudnya Koordinasi Lintas Sektoral Bidang Hukum dan HAM yang Efektif Dalam Mendukung "Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegrasi dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan Visi Kemenko Polhukam, maka ditetapkan Misi Kemenko Polhukam periode 2020-2024 sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang

pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan

c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sejalan dengan misi Kemenko Polhukam dan dalam rangka mewujudkan visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, maka ditetapkan misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif; dan
b. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang administrasi umum dan tata usaha.

Pencapaian Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang Materi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, dan Pemajuan dan Perlindungan HAM dengan didukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

2.3 TUJUAN

Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam tujuan terdapat indikator tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan untuk diwujudkan pada periode lima tahun. Tujuan tersebut mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM untuk mendukung upaya pencapaian dan

perwujudan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dijelaskan melalui Tabel.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
T.1 Terciptanya stabilitas Hukum dan HAM	Indeks Pembangunan Hukum (IPH)	0,65	0,67	0,69	0,71	0,73
	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	4,00	4,03	4,06	4,09	4,14
T.2 Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance dan menguatnya kelembagaan	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	17	30	30,5	31	31.5

2.4 Sararan Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Sasaran strategis ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, yaitu:

1. Kegiatan Teknis, yang mencerminkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kepada K/L terkait, dan
2. Kegiatan Dukungan Administrasi, merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran

strategis ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan menjadi dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Tabel. Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T.1. Terciptanya stabilitas Hukum dan HAM	SS.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif
T.2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan	SS.2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Dengan mengacu pada tujuan strategis serta mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*, tujuan strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, selanjutnya dijabarkan dalam dua sasaran strategis seperti pada Tabel Ketercapaian sasaran-sasaran strategis diukur dengan berbagai indikator utama seperti pada Tabel.

Tabel. Indikator-Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2020	TARGET 2024
SS.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan	80%	85%

Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas Sektoral yang Efektif	HAM pada KL dibawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional		
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50%	60%
	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50%	60%
SS.2 Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	17	21
	Indeks Kepuasan	4	4

	Pelayanan Sekreatariat Deputi		
	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM	75	90

2.5 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai ringkasan atas uraian diatas, pada Gambar Kerangka Logis diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM.

Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menjadi arahan utama yang memberi petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Visi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM hendak menjawab tentang jati diri Organisasi, yaitu sebagai Organisasi yang memiliki fungsi Koordinator, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Hukum dan HAM yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan berkesinambungan. Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM hendak menjawab yang dikerjakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yaitu menciptakan stabilitas dibidang Hukum dan HAM

Gambar 2.1 Kerangka Logis

Berdasarkan Gambar 2.1, Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM diletakkan dalam lapisan tertinggi. Yang

selanjutnya diturunkan dalam dua tujuan yang memberi arah yang lebih terhadap semua aktivitas dalam organisasi agar Visi organisasi dapat tercapai dan Misi organisasi dapat dijalankan dengan baik. Tujuan mengindikasikan ukuran efektivitas kegiatan-kegiatan yakni (1) terciptanya stabilitas Hukum dan HAM, serta (2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi, *good governance*, dan menguatnya kelembagaan.

Tujuan Strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam dua Sasaran Strategis yang pada intinya menjabarkan Sasaran Strategis sesuai dengan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM (SS-1) serta Sasaran Strategis yang bersifat dukungan (SS-2).

Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut dapat disebut sebagai peta strategi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020-2024. Gambar 2.3 memperlihatkan peta strategi tersebut

Gambar 2.2 Peta Strategis

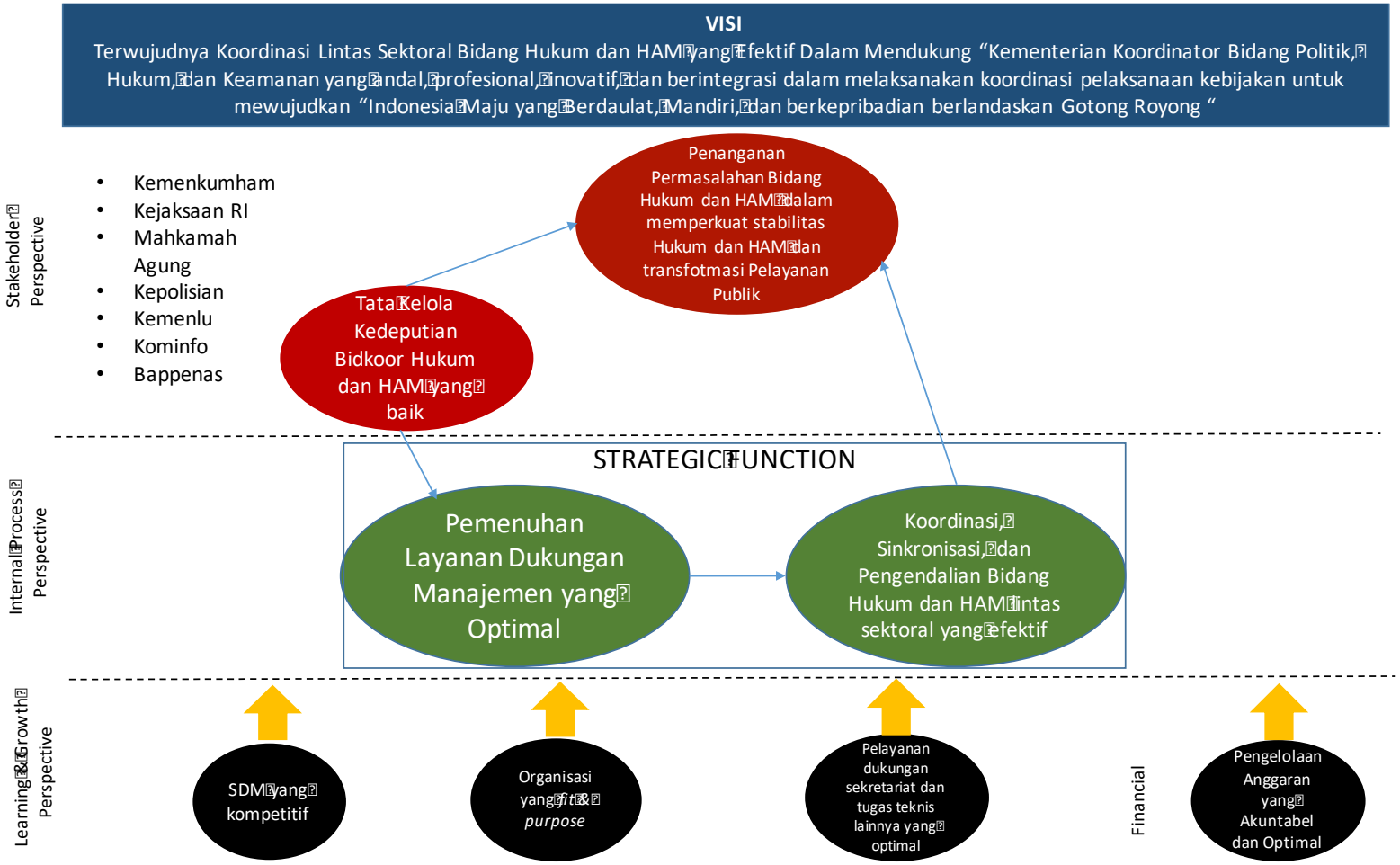

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDKOOR HUKUM DAN HAM

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan arah kebijakan dan strategi nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode ke-4 tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2007. Untuk pelaksanaannya, RPJPN 2005-2025 dibagi dalam empat tahap, yakni RPJMN ke-1 2005-2009, RPJMN ke-2 2010-2014, RPJMN ke-3 2015-2019 dan RPJMN ke-4 2020-2024. Masing-masing tahap memiliki tujuan pembangunan nasional sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini:

Kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-4 periode 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sebagaimana disebutkan dalam buku 1 RPJMN 2020-2024 bab 1 sesuai arahan RPJPN 2005 – 2025.

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Kondisi tersebut merupakan pra-syarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diantisipasi selama lima tahun mendatang adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah dinamika politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi, dan populisme, serta instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Selanjutnya arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi,

Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidkoor Hukum dan HAM

Dalam mengawal arah kebijakan dan staretegi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yaitu Penguatan Gerakan Indonesia Tertib dan Pengawalan Penegakan Hukum Nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun arah kebijakan dan strategi bidang Hukum dan HAM pada Tahun 2020–2024 yang disusun secara komprehensif dan inklusif dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional serta menjawab potensi dan permasalahan bidang hukum dan HAM selama 5 tahun kedepan yakni:

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penegakan Hukum Nasional	• Penataan regulasi bidang politik, hukum, dan keamanan; • Optimalisasi peran Teknologi Informasi (TI) dalam penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); • Mendorong penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; • Penegakan norma dan hukum intenasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia; • Peningkatan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penanganan Kasus pelanggaran hak asasi manusia; • Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan; dan • Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas.

Sistem Hukum Nasional yang Mantap

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penataan Regulasi	• Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: - sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; - integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; - optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; - penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan - dukungan database berbasis teknologi informasi; dan • Pembaruan substansi hukum antar lain perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional dan

	kepailitan.
Perbaikan Sistem Peradilan	• Penerapan pendekatan keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia; • Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegakan hukum; dan • Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan,

	edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
Optimalisasi Upaya Anti Korupsi	• Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan • Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	• Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan • Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam

	bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

3.2 Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1.	Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Asdep Materi Hukum	Tahun 2020
2.	Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	Asdep Penegakan Hukum	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
3.	RUU Kitab UU Hukum Pidana	Asdep Penegakan Hukum	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
4.	Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang	Asdep Hukum Internasional	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
5.	RUU Badan Usaha	Asdep Hukum Internasional	Tahun 2021 s.d Tahun 2022

3.3 Kerangka Kelembagaan

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam Perpres dimaksud juga mengatur tentang organisasi Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia;
c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum;
d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum;
e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional;
g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

3.4 Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

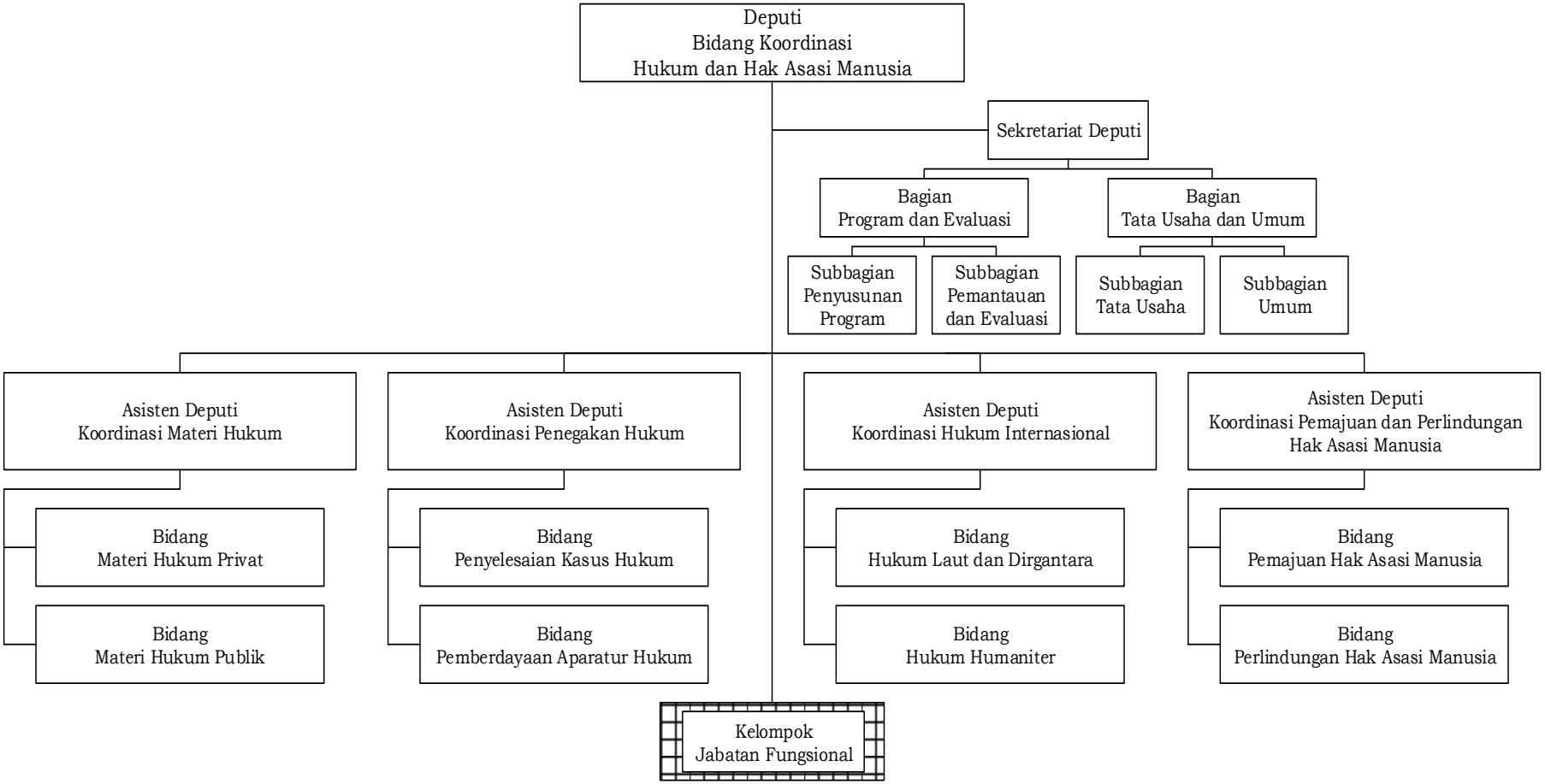

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan diuraikan mengenai target kinerja yang ditetapkan untuk indikator kinerja sasaran stratetegis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan

4.2 Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan

Indikator Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020 – 2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM 2020 – 2024 disertai target kinerjanya adalah sebagaimana terlampir.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Kemenko Polhukam akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program teknis dan program generik tersebut disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil

(outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output).

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Kode	**Program/ Kegiatan**	**Alokasi (Rp. Miliar)**					**Unit Penanggung Jawab**
		Alokasi 2020	**Prakiraan Maju**				
Keg			**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
2451	Koordinasi Hukum Internasional	1.462	2.462	3.462	3.662	3.862	Deputi III
2458	Koordinasi Materi Hukum	2.193	3.193	4.193	4.393	4.593	Deputi III
2464	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM	1.879	2.879	3.379	3.579	3.779	Deputi III
2474	Koordinasi Penegakan Hukum	4.908	5.908	6.908	7.408	7.608	Deputi III
5903	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	Deputi III
Jumlah		**11.943**	**16.242**	**19.942**	**21.342**	**22.342**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN IV (2020-2024), Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan Program Prioritas Bidang Polhukhankam.

Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan agenda Kemenko Polhukam. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kemenko Polhukam.

Rencana Strategis ini memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome).

Rencana Strategis ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dan unit kerja lain di Kemenko Polhukam. Rencana Strategis ini sebagai pedoman bagi pejabat terkait dalam pelaksanaan

kegiatan agar tercapai kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Jakarta, Februari 2020
Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Dr. Fadil Zumhana

Lampiran 1

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Baseline	Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1 (SS 1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM lintas sektoral yang efektif					
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1)	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80%	80%	85%	85%	85%
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1.1)	Persentase Capaian Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) yang didukung oleh Kemenko Polhukam	80%	80%	85%	85%	85%
Indikator Kinerja 1.1 (IK 1.1.2)	Persentase Capaian Skor Indeks Pembangunan Hukum (IPH) yang didukung oleh Kemenko Polhukam	80%	80%	85%	85%	85%

Indikator Kinerja 1.2 (IK 1.2)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50%	50%	55%	55%	60%
Indikator Kinerja 1.3 (IK 1.3)	Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50%	50%	55%	55%	60%
Sasaran Strategis 2 (SS 2)	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal					
Indikator Kinerja 2.1 (IK 2.1)	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB
Indikator Kinerja 2.2 (IK 2.2)	Nilai PMPRB	17	18	19	20	21
Indikator Kinerja 2.3 (IK 2.3)	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4
Indikator Kinerja 2.4 (IK 2.4)	Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020-2024

No	Kegiatan/ Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM									Deputi III
	Layanan Manajemen Eselon I		Pemenuhan dukungan layanan manajemen Eselon I yang prima							
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	Skor	
			Nilai PMPRB	17	18	19	20	21	Skor	
			Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4	Indeks	
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90	Indeks	
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	13	13	13	13	13	Rekom	

No	Kegiatan/ Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
	HAM									
2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Hukum dan HAM Lintas Sektoral Yang Efektif	Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	80	80	85	85	85	%	
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional	50	50	55	55	60	%	
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti	50	50	55	55	60	%	
3		Pelaksanaan Tugas Khusus Yang Optimal	Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100	100	100	100	100	%	

Lampiran 3

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020-2024

No	Kegiatan/ Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Hukum dan HAM									Sesdep
	Layanan Manajemen Eselon I									
		Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	70	70	75	75	75	Skor	
			Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	A	Skor	
			Nilai PMPRB	17	18	19	20	21	Skor	

No	Kegiatan/ Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
			Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	4	4	4	5	5	Indeks	
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	75	80	85	85	90	Indeks	
2	Koordinasi Materi Hukum									Asdep 1
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Materi Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	3	3	3	3	3	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang	50	50	50	50	50	%	

No	Kegiatan/ Output	Sasaran Strategis	Indikator	Target					Satuan	UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024		
			ditindaklanjuti							
3	Koordinasi Penegakan Hukum									Asdep 2
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Penegakan Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	6	6	6	6	6	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	
4	Koordinasi Hukum Internasional									Asdep 3
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Hukum Internasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional	2	2	2	2	2	Rekom	

			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	
5	Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM									Asdep 4
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM									
		Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	2	2	2	2	2	Rekom	
			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50	%	

			Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti	50	50	50	50	50	%	

Lampiran 4

INDIKATOR KELUARAN
DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020-2024

Kode Kegiatan	Program/Kegiatan	Sasaran Keluaran	Indikator Kinerja Keluaran	Target					UPJ
				2020	2021	2022	2023	2024	
2458	Kegiatan Koordinasi Materi Hukum	Terselenggaranya koordinasi Bidang Materi Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum	3	3	3	3	3	Asdep 1
2474	Kegiatan Koordinasi Penegakan Hukum	Terselenggaranya koordinasi Bidang Penegakan Hukum lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum	6	6	6	6	6	Asdep 2

2451	Kegiatan Koordinasi Hukum Internasional	Terselenggaranya koordinasi Bidang Hukum Internasional lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional	2	2	2	2	2	Asdep 3
2464	Kegiatan Pemajuan dan Perlindungan HAM	Terselenggaranya koordinasi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM lintas sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM	2	2	2	2	2	Asdep 4
5903	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Terselenggaranya reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan	Jumlah layanan manajemen Eselon I	1	1	1	1	1	Sesdep

Lampiran 5

MATRIKS TARGET KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA STRATEGIS

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sasaran Program 3)								11.943,5	12.948,6	13.973,0	15.016,0	16.078,8	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Lintas Sektoral Yang Efektif												
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam	80%	80%	85%	85%	85%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		sesuai dengan dokumen perencanaan nacional											
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam dokumen perencanaan nasional	50%	50%	55%	55%	60%						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti	50%	50%	55%	55%	60%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal												
		Persentase (%) penyelesaian tugas khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100%						
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB						
		Nilai PMPRB	17	18	19	20	21						
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia								1.500	1.575,0	1.653,8	1.736,4	1.823,3	Sesdep Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal												
		Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB						
		Nilai PMPRB	17	18	19	20	21						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi	4	4	4	4	4						
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	75	80	85	85	90						
		Skor Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	70	70	75	75	75						
Koordinasi Materi Hukum								2.193,1	2.302,8	2.417,9	2.538,8	2.665,8	Asdep Koordinasi Materi Hukum

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Materi Hukum Lintas Sektoral yang efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Materi Hukum	3	3	3	3	3						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50%	50%	50%	50%	50%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi Penegakan Hukum								4.908,5	5.591,0	6.277,7	6.967,1	7.659,1	Asdep Koordinasi Penegakan Hukum
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Penegakan Hukum Lintas Sektoral yang efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Penegakan Hukum	5	5	5	5	5						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50%	50%	50%	50%	50%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						
	Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum yang Optimal												
		Jumlah Kebijakan Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum	1	1	1	1	1						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Koordinasi Hukum Internasional								1.462,1	1.506,0	1.551,1	1.597,6	1.645,6	Asdep Koordinasi Hukum Internasional
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Hukum Internasional Lintas Sektoral yang efektif												
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Hukum Internasional	2	2	2	2	2						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan	50%	50%	50%	50%	50%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		nasional											
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						
Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia								1.879,8	1.973,8	2.072,5	2.176,1	2.285,0	Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Lintas Sektoral yang efektif												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	2	2	2	2	2						
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang mendukung dokumen perencanaan nasional	50%	50%	50%	50%	50%						
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia yang ditindaklanjuti	50%	50%	50%	50%	50%						

Lampiran 6

MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab	Target Penyelesaian
1.	Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Asdep Materi Hukum	Tahun 2020
2.	Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	Asdep Penegakan Hukum	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
3.	RUU Kitab UU Hukum Pidana	Asdep Penegakan Hukum	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
4.	Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang	Asdep Hukum Internasional	Tahun 2021 s.d Tahun 2022
5.	RUU Badan Usaha	Asdep Hukum Internasional	Tahun 2021 s.d Tahun 2022

Lampiran 7

MATRIKS POHON KINERJA

No.	Indikator Kinerja					Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024
	Kementerian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV					
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokuman perencanaan nasional [Deputi III]				80	80	85	85	85
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum [Asdep Makum]			3	3	3	3	3
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]		2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]		2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]		2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]		2	2	2	2	2

			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum [Asdep Gakum]		6	6	6	6	6
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Penyelesaian Kasus Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional [Asdep HI]		2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2

				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Asdep PP HAM]		2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
				Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
		Persentase (%) penyelesaian tugas khusus [Deputi III]			100	100	100	100	100
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional [Deputi III]			50	50	55	55	60
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Makum]		50%	50%	50%	50%	50%

				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Meteri Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	3	3	3	3	3
				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	3	3	3	3	3
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Privat yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Publik yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	6	6	6	6	6
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Penyelesaian Kasus Hukum yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum yang sesuai [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50

				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelesaian Kasus Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	6	6	6	6	6
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep HI]		50	50	50	50	50
				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Laut dan Dirgantara yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Hukum Laut]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Humaniter yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50
				Jumlah Draft rekomendasi Kebijakan BIdang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2

				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Perlindangan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50
				Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
		Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti [Deputi III]			50	50	55	55	60
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti [Asdep Makum]		50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum []	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum []	50	50	50	50	50

				Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Meteri Hukum [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklnajuti [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang penegakan Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Deputi Bidang Penegakan Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti [Asdep HI]		50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Laut]	50	50	50	50	50

				Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50
				Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) draft Rekomndasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50
2	Nilai RB Kemenko Polhukam								
		Nilai PMPRB [Deputi III]			17	18	19	20	21
			Nilai Zona Integritas [Sesdep III]		70	70	75	75	75
				Persentase Implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
			Nilai PMPRB [Sesdep III]		17	17	17	17	17

				Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
				Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]	75	75	75	75	75
				Penyusunana Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 -2024 [Kabag TU III]	1	1	1	1	1
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi [Deputi III]			4	4	4	4	4
			Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]		4	4	4	4	4
				Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]	4	4	4	4	4
				Persentase ketepatan waktu tindak lanjut dokumen administrasi umum [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
				Skor Indeks Layanan Kepuasan Usaha dan Umum [Kabag TU III]	4	4	4	4	4
3	Nilai SAKIP Kemenko Polhukam								

		NIlai SAKIP [Deputi III]				B	B	BB	BB	BB
			Nilai SAKIP [Sesdep III]			B	B	B	B	B
				Persentase Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]		75	75	75	75	75
					Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi [Kasubbag Proren De III]	2	2	2	2	2
		Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi [Deputi III]				75	80	85	85	90
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]			75	75	75	75	75
				Persentase Ketepatan waktu tindak lanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]		80	80	80	80	80
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional [Deputi III]				80	80	85	85	85
			Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional			80	80	85	85	85

			[Deputi III]							
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum [Asdep Makum]		3	3	3	3	3
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum [Asdep Gakum]		6	6	6	6	6
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Penyelesaian Kasus Hukum	2	2	2	2	2

					[Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]					
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional [Asdep HI]		2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2

					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Asdep PP HAM]		2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2

					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
			Persentase (%) penyelesaian tugas khusus [Deputi III]			100	100	100	100	100
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional [Deputi III]			50	50	55	55	60
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Makum]		50%	50%	50%	50%	50%
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Meteri Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	3	3	3	3	3
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	3	3	3	3	3
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Privat yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Publik yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	6	6	6	6	6
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Penyelesaian Kasus Hukum yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum yang sesuai [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50

					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelesaian Kasus Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	6	6	6	6	6
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep HI]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Laut dan Dirgantara yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Hukum Laut]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Humaniter yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50

				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft rekomendasi Kebijakan BIdang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Perlindangan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti [Deputi III]			50	50	55	55	60

				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti [Asdep Makum]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum []	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum []	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Meteri Hukum [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklnajuti [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang penegakan Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Deputi Bidang Penegakan Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti		50	50	50	50	50

				[Asdep HI]						
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Laut]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) draft Rekomndasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50
			Nilai PMPRB [Deputi III]			17	18	19	20	21
				Nilai Zona Integritas [Sesdep III]		70	70	70	70	70
					Persentase Implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
				Nilai PMPRB [Sesdep III]		17	17	17	17	17
					Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75

					Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]	75	75	75	75	75
					Penyusunana Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 -2024 [Kabag TU III]	1	1	1	1	1
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi [Deputi III]			4	4	4	4	4
				Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]		4	4	4	4	4
					Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]	4	4	4	4	4
					Persentase ketepatan waktu tindak lanjut dokumen administrasi umum [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
					Skor Indeks Layanan Kepuasan Usaha dan Umum [Kabag TU III]	4	4	4	4	4
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang terpenuhi								

		[Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang terpenuhi [Kasubbag TU De III]								
		Penyusunan laporan pengelolaan sistem informasi dan kepegawaian [Kasubbag Umum De III]								
			NIlai SAKIP [Deputi III]			B	B	BB	BB	BB
				Nilai SAKIP [Sesdep III]		B	B	B	B	B
					Persentase Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]	75	75	75	75	75
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi [Deputi III]			75	80	85	85	90
				Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]		75	75	75	75	75
					Persentase Ketepatan waktu tindak lanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]	80	80	80	80	80
		[Kasubbag Monev De III]								

		Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi [Kasubbag Monev De III]					
		Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi [Kasubbag Monev De III]					
		Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 [Kasubbag TU De III]					
		Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang terpenuhi [Kasubbag Umum De III]					
		jumlah dokumen perencanaan yang disusun [Kasubbag Proren De III]					
		Persentase jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan tepat waktu [Kasubbag Monev De III]					
		Jumlah laporan tindak lanjut dokumen administrasi umum [Kasubbag TU De III]					
		Jumlah laporan pengelolaan arsip [Kasubbag Umum De III]					
		Persentase jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu [Kasubbag Proren De III]					
6							
		Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dengan dokumen perencanaan nasional [Deputi III]	80	80	85	85	90

			Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Hukum dan HAM pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokuman perencanaan nasional [Deputi III]			80	80	85	85	90
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum [Asdep Makum]		3	3	3	3	3
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Penegakan Hukum [Asdep Gakum]		6	6	6	6	6

					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Penyelesaian Kasus Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Internasional [Asdep HI]		2	2	2	2	2

					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Asdep PP HAM]		2	2	2	2	2
					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Pemajuan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2

					Jumlah laporan identifikasi masalah dan agenda setting Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
					Jumlah laporan analisis kebijakan Bidang Perlindungan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
			Persentase (%) penyelesaian tugas khusus [Deputi III]			100	100	100	100	100
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang hukum dan HAM dalam dokumen perencanaan nasional [Deputi III]			50	50	55	55	60
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Makum]		50%	50%	50%	50%	50%
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Meteri Hukum Privat [Kabid Makum Privat]	3	3	3	3	3
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Materi Hukum Publik [Kabid Makum Publik]	3	3	3	3	3

					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Privat yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Materi Hukum Publik yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	6	6	6	6	6
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Penyelesaian Kasus Hukum yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemberdayaan Aparatur Hukum yang sesuai [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Penyelesaian Kasus Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	6	6	6	6	6
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep HI]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Laut dan Dirgantara [Kabid Hukum Laut]	2	2	2	2	2
					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Hukum Humaniter [Kabid Hukum Humaniter]	2	2	2	2	2
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Laut dan Dirgantara yang sesuai dokumen perencanaan nasional	50	50	50	50	50

					[Kabid Hukum Laut]					
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Hukum Humaniter yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mendukung dokumen perencanaan nasional [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50
					Jumlah Draft rekomendasi Kebijakan BIdang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	2	2	2	2	2
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Pemajuan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Bidang Perlindangan HAM yang sesuai dokumen perencanaan nasional [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50

					Jumlah Draft Rekomendasi Kebijakan Bidang Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	2	2	2	2	2
			Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Hukum dan HAM yang ditindaklanjuti [Deputi III]			50	50	55	55	60
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Materi Hukum yang ditindaklanjuti [Asdep Makum]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Meteri Hukum [Kabid Makum Publik]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Materi Hukum [Kabid Makum Privat]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Penegakan Hukum yang ditindaklnajuti [Asdep Gakum]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi Yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang penegakan Hukum [Kabid Penyelesaian Kasus Hukum]	50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Deputi Bidang Penegakan Hukum [Kabid Pemberdayaan Aparatur]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti [Asdep HI]		50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Laut]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Hukum Internasional [Kabid Hukum Humaniter]	50	50	50	50	50
				Persentase (%) rekomendasi kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti [Asdep PP HAM]		50	50	50	50	50

					Persentase (%) Draft Rekomendasi yang dimanfaatkan menjadi Rekomendasi Kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindungan HAM [Kabid Pemajuan HAM]	50	50	50	50	50
					Persentase (%) draft Rekomndasi yang dimanfaatkan menjadi rekomendasi kebijakan oleh Asisten Deputi Bidang Pemajuan dan Perlindangan HAM [Kabid Perlindungan HAM]	50	50	50	50	50
			Nilai PMPRB [Deputi III]			17	18	19	20	21
				Nilai Zona Integritas [Sesdep III]		70	70	70	70	70
					Persentase Implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
				Nilai PMPRB [Sesdep III]		17	17	17	17	17

					Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Tata Usaha dan Umum pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
					Persentase implementasi Rencana Aksi Area Perubahan Reformasi Birokrasi Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]	75	75	75	75	75
					Penyusunana Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 -2024 [Kabag TU III]	1	1	1	1	1
			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi [Deputi III]			4	4	4	4	4
				Indeks Kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]		4	4	4	4	4
					Skor Indeks Layanan Kepuasan Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]	4	4	4	4	4

					Persentase ketepatan waktu tindak lanjut dokumen administrasi umum [Kabag TU III]	75	75	75	75	75
					Skor Indeks Layanan Kepuasan Usaha dan Umum [Kabag TU III]	4	4	4	4	4
		Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang terpenuhi [Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang terpenuhi [Kasubbag TU De III]								
		Penyusunan laporan pengelolaan sistem informasi dan kepegawaian [Kasubbag Umum De III]								
			NIlai SAKIP [Deputi III]			B	B	BB	BB	BB
				Nilai SAKIP [Sesdep III]		B	B	B	B	B
					Persentase Implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM [Kabag PE III]	75	75	75	75	75
			Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi [Deputi III]			75	80	85	85	90

				Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi Bidkoor Hukum dan HAM [Sesdep III]		75	75	75	75	75
					Persentase Ketepatan waktu tindak lanjut dokumen Perencanaan dan Evaluasi [Kabag PE III]	80	80	80	80	80
		4 [Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi [Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah dokumen penyusunan evaluasi kinerja dalam SAKIP yang terpenuhi [Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 [Kasubbag TU De III]								
		Jumlah dokumen implementasi Rencana Aksi Zona Integritas menuju WBK pada Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM yang terpenuhi [Kasubbag Umum De III]								
		Persentase jumlah dokumen evaluasi yang diselesaikan tepat waktu [Kasubbag Monev De III]								
		Jumlah laporan tindak lanjut dokumen administrasi umum [Kasubbag TU De III]								
		Jumlah laporan pengelolaan arsip [Kasubbag Umum De III]								

		Persentase jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu [Kasubbag Proren De III]					